

TESIS

**SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN PANDEMI COVID 19**



Oleh:

CHOIRUL ARIFIN, S.H.

NIM : 031914153080

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN PANDEMI COVID 19**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**CHOIRUL ARIFIN, S.H.
NIM : 031914153080**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui Tanggal 18 Januari 2022

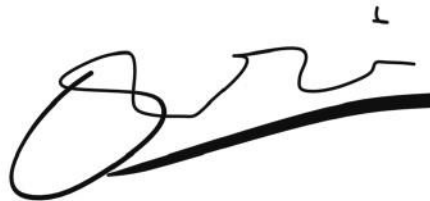
Oleh :

Dosen Pembimbing Ketua



(Dr. Maradona, S.H.,LL.M.)
NIP. 19830419 2006041001

Pembimbing Kedua



(Dr. Bambang Suhervadi, S.H.,M.Hum.)
NIP. 19680928 1997021001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



(Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.)
NIP. 19640107 198903 2 001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, Pada
tanggal 24 November 2021**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Astutuik, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Maradonna, S.H.,LL.M

Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.

Riza Alfianto, S.H.,MTCP.

Prilian Cahyani, S.H.,S.AP.,M.H.,LLM.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Rabu, 24 November 2021
Ruang : Daring
Pukul : 13.00 WIB
Nama Mahasiswa : Choirul Arifin, S.H.
Nim : 031914153080
Judul : Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, November 2021
Yang membuat pernyataan



CHOIRUL ARIFIN, S.H.
NIM. 031914153080

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Ratio legis penerapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan penerapan protokol kesehatan pandemi Covid 19 dan penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi Covid-19 pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebuah tujuan yang pada hakikatnya telah bersesuaian dengan kebijakan umum penanggulangan pandemi. Jika dilihat berdasarkan aspek kebijakan kriminal yang memiliki tujuan sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan publik (*social defence*), sekaligus upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan kebijakan kriminal sebagai dasar konseptual hukum pidana sangat jelas, yakni untuk melindungi serta mensejahterakan masyarakat. Melalui upaya pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan, upaya-upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (pencegahan tanpa pidana). Tetapi, Penggunaan sarana penal tidak bisa serta merta digunakan karena berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia. Sehingga penggunaan sarana penal haruslah memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi Covid 19 hendaknya memperhatikan beberapa faktor khususnya keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah sebelum menerapkan sanksi pidana hendaknya Pemerintah memperhatikan terlebih dahulu kebutuhan dasar masyarakat sebagai bentuk kewajiban. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi Covid 19 dinilai kurang efektif dikarenakan belum mencerminkan beberapa aspek nilai diantaranya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Protokol Kesehatan, Covid 19

ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a statutory approach, and a conceptual approach. The problems in this thesis are: Ratio legis the application of criminal sanctions in laws and regulations on the application of the Covid 19 pandemic health protocol and the application of criminal sanctions in overcoming the Covid-19 pandemic.

The application of criminal sanctions against violators of the Covid-19 pandemic health protocol in principle has the aim of preventing the spread of Covid-19. A goal that is essentially in line with the general policy of dealing with the pandemic. If viewed from the aspect of criminal policy which has a goal as an effort to overcome crime which is an integral part of public protection efforts (social defense), as well as efforts to achieve social welfare. The purpose of criminal policy as a conceptual basis for criminal law is very clear, namely to protect and prosper the community. Through efforts to prevent and overcome a crime, these efforts can be realized through the use of penal (criminal law) and non-penal (prevention without criminal) means. However, the use of penal means cannot be used immediately because it is related to violations of human rights. So that the use of penal facilities must meet the requirements of justice and usability. The application of criminal sanctions against violators of the Covid-19 pandemic health protocol should pay attention to several factors, especially justice. The justice in question is that before applying criminal sanctions, the Government should first pay attention to the basic needs of the community as a form of obligation. The application of criminal sanctions against violators of the Covid-19 pandemic health protocol is considered ineffective because it does not reflect several aspects of value including legal certainty, legal justice and legal expediency.

Keywords: Criminal Sanctions, Health Protocol, Covid 19

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID 19**. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II dan Bapak Maradona, SH.,LL.M., Ph.D selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum selaku Ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen MKPT I;
5. Bapak Dr. Maradona, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing II;
6. Ibu Dr. Astutik, S.H.,M.H., selaku Dosen MKPT II;
7. Bapak Riza Alfianto Kurniawan, S.H.,MTCP selaku Dosen penguji;
8. Ibu Prilian Cahyani, S.H.,SAP.,M.H.,LLM.;
9. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
10. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;

11. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah memberikan motivasi dan semua bantuannya;
12. Istri tercinta dan Anak tersayang yang selalu memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, November 2021

CHOIRUL ARIEFIN, S.H.
NIM. 031914153080

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Tinjauan Pustaka	6
1.5.1. Covid 19.....	6
1.5.2. Sanksi Pidana	7
1.5.3. Protokol Kesehatan	13
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Tipe Penelitian	15
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	18
1.7. Sistematika Penulisan	19

**BAB II RATIO LEGIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID 19**

2.1.	Pandemi Covid 19	21
2.1.1	Sejarah Covid 19	21
2.1.2	Penyebaran Covid 19 di Indonesia	26
2.1.3	Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19.....	31
2.2.	Pengaturan Sanksi Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19	41
2.3.	Ratio Legis Penerapan Sanksi Pidana dalam Kebijakan Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19	46
2.3.1.	Teori Pidana.....	46
2.3.2.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19	54

BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID 19

3.1.	Pengertian dan Jenis Pidana Sanksi.....	69
3.2.	Instrumen Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19	76
3.3.	Hambatan dalam Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19.....	81
3.4.	Penanggulangan Hambatan Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19	91

BAB IV PENUTUP

4.1.	Kesimpulan	94
4.2.	Saran.....	95

DAFTAR BACAAN